



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1444 H/2023 M
Dengan	: Dirjen PHU Kemenag RI, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 8 Februari 2023
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Pembahasan Masukan atas Hasil Peninjauan Tim Panja BPIH Komisi VIII DPR RI ke Arab Saudi
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 27 dari 28 Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI. 2. 1 Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Izin 3. Dirjen PHU Kemenag RI, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Mengenai Masukan atas Hasil Peninjauan Tim Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1444 H/2023 M ke Arab Saudi pada pukul 14.50 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1444 H/ 2023 M H. Marwan Dasopang, M.Si, dengan didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Ashabul Kahfi, M. Ag, Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, dan Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Kementerian Agama RI, Irjen Kementerian Agama RI, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. membahas **“Pembahasan Masukan Atas Hasil Peninjauan Tim Panja BPIH Komisi VIII DPR RI ke Arab Saudi Tahun 1444 H/2023 M”**, di catat beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Pemerintah terkait hasil kunjungan kerja ke Arab Saudi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pertemuan dengan GACA terkait kesiapan Bandara Thaif yang belum memenuhi standar pelayanan Jemaah haji tahun 1444 H/2023 M, Bandara Kertajati akan dilakukan inpeksi Bersama Kementeriabnn Perhubungan untuk melakukan inpeksi pada 14 Februari 2023, segera melakukan kontrak dengan maskapai agar dapat mengajukan slot time kedatangan dan kepulangan Jemaah baik melalui bandara Madinah maupun Jeddah
 - b. Akomodasi dengan system zonasi 5 wilayah di Mekkah dan Madinah tidak ada perubahan
 - c. Simulasi penurunan BPIH dengan asumsi nilai tukar 1 USD=Rp.15.300 dan 1 SAR=Rp4.080,- menjadi 1 USD=Rp15.00 dan 1 SAR=Rp.000
 - d. Akomodasi Makkah dari harga semula SAR4.600 menjadi SAR4.450

- e. Catering makkahh dan Madinah yang semula makan 3 kali dengan harag SAR18.5 menjadi 2x makan dengan harga satuan SAR18,5 dan sarapan dengan harga satuan SAR12
 - f. Konsumsi 3 hari sebelum masyair dan 2 hari setelah masyair tidak diberikan makan
2. Dirjen Perhubungan sudah melakukan koordinasi untuk kesiapan kertajati menjadi landasan pemberangkat Jemaah haji dan belum ada koordiansi dengan pihak perhubungan Saudi Arabia terkait penggunaan Bandara Thaif sebagai landasan Jemaah haji tahun ini
 3. PT Garuda prinsipnya siap mendukung penerbangan haji dan akan ikut skema biaya yang disepakati antara DPR dan Pemerintah
 4. Kepala BPKH menyampaikan beberapa hal sebagai berikut
 - a. Tingkat likuiditas keuangan Haji tetap terjaga sesuai ketentuan yakni minimal 2 x BPIH dimana posisi Desember 2023 adalah sebesar 2,3 X BPIH dab dana likuiditas tersebut tersedia pada BPS BPIH
 - b. Proyeksi nilai manfaat keuangan haji diharapkan mam[pu memenuhi biaya penyelenggaraan ibadah haji yang di danai dari sumber nilai manfaat
 - c. Pengadaan likuiditas penyelnggraan ibadah haji dalam valuta asing siap pada saat dibutuhkan dan saaini BPKH sedang menyiapkan terkait halt tersebut berkoordinasi dengan perbankan
 5. Kepala Pusat Kesehatan haji menyampaikan beberapa hal berikut:
 - a. Menyampaikan kebutuhan anggaran Kesehatan haji diantaranya obat-obatan, vaksin menginitis, penugasan petuhas kesehatan haji, klinik Kesehatan haji yang ada di Mekkah, Madinah dan Jeddah, pembekalan intergarasi PPIH Arab Saudi, dan melaksanakan pelatihan kompetensi petuigas kesehatan haji.
 - b. Pihak syarikah Arab Saudi di Mina tidak memberikan tempat klinik Kesehatan yang permanen, karena itu dalam pelayanan Kesehatan di

sekitar MINA dilakukan dengan mobile pelayanan Kesehatan keliling di tenda-tenda Jemaah haji

6. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI meminta kepada Panja Pemerintah Kementerian Agama RI untuk melakukan rasionalisasi atau upaya penurunan besaran BPIH sebagaimana hasil temuan Kunjungan Kerja ke Arab Saudi
7. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH tahun 1444 H/2023 M menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Hasil kunjungan kerja ke Arab Saudi menemukan beberapa item cost pembiayaan haji yang bisa diturunkan, di antaranya biaya harga satuan catering ada persamaan harga antara perusahaan penyedia catering yang besar dan yang kecil yakni sebesar SAR18,5 dan ini menimbulkan tanda tanya besar dan harga tersebut seharusnya bisa diturunkan
 - b. Harga biaya hotel masih tinggi dan Tim Kunker menemukan harga hotel SAR3.300 – 3.600
 - c. Mengenai biaya pesawat agar diturunkan harga dari 33 Juta di turunkan dibawah 28 juta dan maksimal sama dengan tahun 2022
 - d. Tentang BPKH, pada tahun 2020 dan 2021 tidak memberangkatkan haji karena itu nilai manfaat tidak terpakai dan Adapun biaya haji 2022 itu menggunakan nilai manfaat yang berjalan
 - e. Mengusulkan biaya haji total 85 juta dengan rincian nilai manfaat yang maksimal
 - f. Mendorong Kemenag untuk menggunakan bahan makan Jemaah haji dari produk dalam negeri dengan berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Arab Saudi
 - g. Penyediaan fasilitas Kesehatan Jemaah haji yang akan melayani 62.000 jemaah lansia, agar menjadi prioritas dalam pelayanan Kesehatan Jemaah dengan menambah ambulance
 - h. BPKH agar berperan aktif dalam melakukan kajian dan nilai manfaat yang tidak membebani Jemaah Haji

- i. Perlu kajian terkait kebijakan 5 Zonasi di Makkah khususnya wilayah Misfalah yang tidak menimbulkan keadilan dan kemudahan akses ke Baitullah
8. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI merekomendasi di bahas dalam rapat lanjutan sebagai berikut
- a. BPKH harus menjelaskan tentang pengelolaan keuangan setorang awal Jemaah haji, Uang dari nilai manfaat, Kelola dari virtual accout, Kelola dari uang abai umat dan Uang Kelola yan daftar lunas tunda tahun 2020
 - b. BPKH perlu bicara kepada Publik bahwa keuangan haji itu aman dan termasuk ada dana Jemaah haji tunda lunas yang tidak terpakai karena tidak ada pemberangkatan pada tahun 2020-2021
 - c. Dirjen Perhubungan udara Kementerian Perhubungan RI Perlu mengkaji lebih lanjut pengurangan hari Jemaah haji dengan skema penambahan volume penerbangan dari 12 menjadi 15-17 penerbangan. untuk koordinasi dengan pihak perhubungan Saudi.
 - d. Panja Pemerintah Kementerian Agama RI diminta menurunkan harga biaya haji pada setiap komponen item dan menyampaikan dalam rapat lanjutan kepada Panja BPIH Komisi VIII DPR RI

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI BPIH TAHUN 1444 H/2023 M
KETUA,**


H. MARWAN DASOPANG, M.Si